

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul  
Nomor : 034 Tahun 2025  
Tanggal : 13 Oktober 2025

## A. PENDAHULUAN

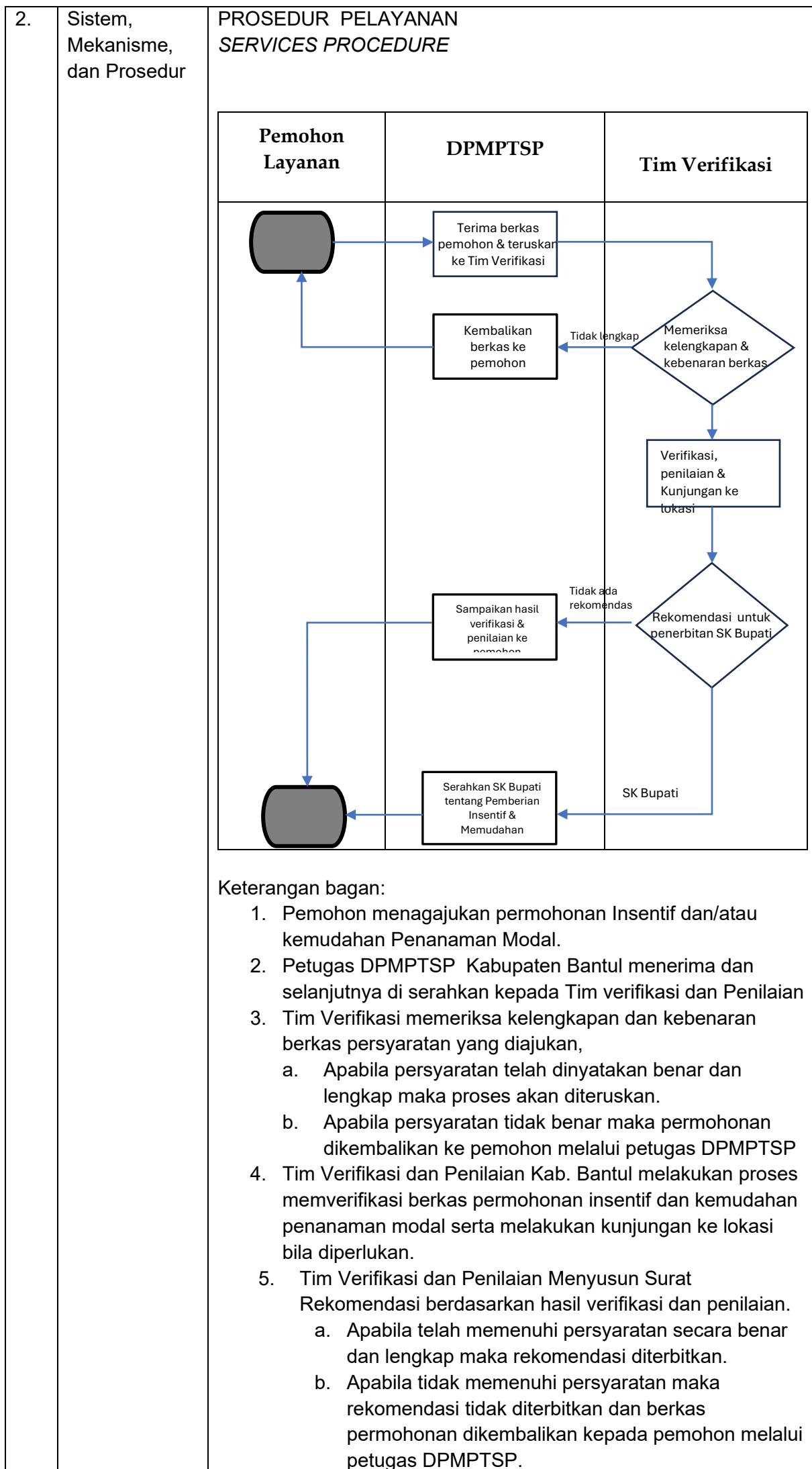
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah salah satu OPD penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Bantul di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan terpenuhinya hak masyarakat, perlu ditetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

## B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Administrasi tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

A. Proses Penyampaian Pelayanan ( <i>Service Delivery</i> )		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Bagi Penanam Modal baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis, dilampiri dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;</li><li>2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, jumlah tenaga kerja lokal dan asing, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;</li><li>3. Laporan Kegiatan Penanaman Modal;</li><li>4. bentuk insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang dimohonkan;</li><li>5. surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan</li><li>6. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan..</li></ol> <p>b. Bagi Penanam Modal yang akan melakukan perluasan usaha, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis, dilampiri dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Copy KTP atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;</li><li>2. Profil perusahaan yang paling sedikit berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, jumlah tenaga kerja lokal dan asing, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;</li><li>3. Neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;</li><li>4. Perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;</li><li>5. Lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;</li><li>6. Laporan Kegiatan Penanaman Modal;</li><li>7. Bentuk insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal yang dimohonkan;</li><li>8. Surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan</li></ol>

		<p>9. Copy KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.</p> <p>c. Penanam Modal mengalami kerugian dan/atau kesulitan modal, Penanam Modal dapat mengajukan surat permohonan tertulis, dilampiri dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;</li><li>2.profil perusahaan yang paling sedikit berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, jumlah tenaga kerja lokal dan asing, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;</li><li>3.neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;</li><li>4.perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;</li><li>5.Laporan Kegiatan Penanaman Modal;</li><li>6.bentuk insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal yang dimohonkan;</li><li>7.surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan</li><li>8. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.</li></ol>
--	--	---



		<p>6. Rekomendasi disampaikan kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan Surat Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Penanaman Modal.</p> <p>7. Penyerahan SK Bupati kepada pemohon oleh DPMPTSP.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Surat Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Penanaman Modal diterbitkan 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan Tim Verifikasi dan Penilaian (Rekomendasi) oleh Bupati.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Surat Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Penanaman Modal.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p><b>Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loket Pengaduan yang ada di ruang <i>Customer Service</i>.</li> <li>2. Ruang pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> <li>3. E-mail : dpmptsp@bantulkab.go.id</li> <li>4. Telepon : (0274) 367867.</li> <li>5. Kotak saran/pengaduan.</li> <li>6. Buku Pengaduan.</li> <li>7. Website <a href="https://dpmptsp.bantulkab.go.id">https://dpmptsp.bantulkab.go.id</a></li> <li>8. Surat langsung ke DPMPTSP Kabupaten Bantul, Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul JL Lingkar Timur Manding TIRENGGO Bantul Kodepos 55714.</li> <li>9. Media Sosial Instagram: @dpmptsp.bantul</li> <li>10. Media Sosial Facebook: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.</li> <li>11. Youtube: DPMPTSP Kabupaten Bantul</li> <li>12. Whatsapp 081328848393.</li> <li>13. Aplikasi SP4N LAPOR!</li> <li>14. Tiktok: @dpmptspbantul</li> </ol>

<b>B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>manufacturing</i>) meliputi :</b>		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik.</p> <p>2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Incentif dan Kemudahan Investasi di Daerah</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Incentif dan Kemudahan Penanaman Modal</p> <p>8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberian Incentif dan Kemudahan Penanaman Modal Di Kabupaten Bantul.</p>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p><b>Sarana dan Prasarana :</b></p> <p>1. Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC.</p> <p>2. Tempat parkir kendaraan.</p> <p>3. Sistem antrian elektronik.</p> <p>4. <i>Free wi-fi.</i></p> <p>5. <i>Leaflet, Electronic Banner.</i></p> <p>6. Mobil dan sepeda motor dinas.</p> <p>7. Ruang arsip.</p> <p>8. Meja.</p> <p>9. Kursi.</p> <p>10. Pesawat telepon.</p> <p>11. Komputer, printer, dan scanner.</p> <p>12. Alat tulis kantor.</p> <p>13. Kotak saran.</p> <p>14. CCTV (<i>Closed-Circuit Television</i>).</p> <p>15. Loket prioritas untuk layanan pemohon berkebutuhan khusus.</p> <p><b>Fasilitas Pendukung :</b></p> <p>1. Semua fasilitas ramah penyandang disabilitas (akses kursi roda, toilet khusus, <i>ramp</i> dan jalur panduan).</p> <p>2. Ruang tunggu khusus bagi pemohon berkebutuhan khusus.</p> <p>3. Petugas terampil yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pemohon berkebutuhan khusus.</p> <p>4. Informasi Layanan disediakan dalam berbagai format (cetak, digital, audio dan braille) untuk memastikan pemohon dapat mengakses dengan mudah.</p> <p>5. Tersedia berbagai saluran komunikasi yang mudah diakses oleh pemohon berkebutuhan khusus (telepon, email, media sosial, dll).</p> <p>6. Media online (Email, Website, Instagram, Facebook, Youtube, Whatsapp).</p> <p>7. Adanya Ruang Konsultasi Perizinan.</p> <p>8. <i>Sub domain</i> perizinan.</p>

		<p>9. Jaringan internet/ intranet.      10. Koran/bahan bacaan.      11. TV.      12. Dispenser Air Minum /Water dispenser.      13. Mushola.      14. Toilet Umum &amp; Toilet khusus untuk penyandang disabilitas.      15. Kantin.      16. Kursi roda.      17. Stasiun pengisian daya.      18. Denah Lokasi      19. Guide (Satpam)      20. Tempat cuci tangan dan sabun/hand sanitizer      21. Ruang laktasi.      22. Ruang bermain anak (play ground).</p> <p>Keterangan: Sarana prasarana dan fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis izin</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Jenjang pendidikan:          a. minimal SMA/SMK, semua jurusan (<i>help desk</i>)          b. minimal Diploma 3, semua jurusan (<i>back office</i>)      2. Pelatihan : Diklat PTSP, Diklat Penanaman Modal, Diklat OSS, Bimtek Aplikasi dan Pelayanan      3. Pangkat / Golongan : minimal Pengatur, II/b      4. Berkemampuan khusus yang telah mendapatkan pelatihan untuk melayani pemohon berkebutuhan khusus.</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>1. Dilakukan oleh Kepala Dinas      2. Dilakukan oleh atasan langsung.</p>
5.	Jumlah Pelaksana	<p>1. 7 (tujuh) orang (<i>front office</i>);      2. 8 (delapan) orang (<i>back office</i>).</p>
6.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya.      2. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN.      3. Apabila surat izin/ sertifikat / rekomendasi telah terbit, pemohon diberitahu melalui akun pemohon pada Sistem Pelayanan Perizinan Online DPMPTSP Kab. Bantul dan e-mail pemohon.</p>
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<p>1. CCTV;      2. Tabung Pemadam Kebakaran.      3. Tanda tangan digital      4. QR Code (tandatangan elektronik)</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Evaluasi dilaksanakan secara rutin;      2. Survei Kepuasan Masyarakat;      3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p>
9.	Masa Berlaku	Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Penanaman Modal diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
10.	Waktu Pelayanan	Senin – Jumat : 08.00 – 14.30 WIB



Ditetapkan di Bantul  
 Pada Tanggal 13 Oktober 2025

Dra. Annihayah, M.Eng  
 NIP. 196902041993032004

